

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad & Murniati, Rilda. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Edisi Kedua. Cet. I. (Bandung: Alumni, 1996).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Djoni S. Gazali dan Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Cet. III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Perlindungan Departemen Konsumen & Keuangan, Otoritas Jasa. *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. cetakan ke-VIII. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. V. (Bandung: Binacipta, 1994).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. XII. (Jakarta: Intermasa, 1990).
- Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cet. V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja, 2003).
- Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 294.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Tahun 2016, Nomor 324.

Jurnal

Abd. Kadir Arno, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 2, No. 1, (2017). 85-95.
<https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>

Abdurrazaq Triansyah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta).” *Jurnal Cross-border*. Vol. 5, No. 2, (2022).
<https://doi.org/10.2186/jcb.v5i2.213>

Ari Rahmad Hakim, “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ganec Swara*. Vol. 14, No. 1, (2020). <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>

Depri Liber Sonata, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, (2014).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no1.283>

Dhea Khoirunisa, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan *Financial Technology*

(Fintech) di Indonesia.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3, (2023).
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>

Edi Supriyanto, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web.” *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. Vol. 9, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>

Elvira Fitriyani Pakpahan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 9 No. 3, (2020).
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>

Grasela Gloria Sengkey, “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 11, No. 2, (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45683>

Grece Linda Sihombing, “Perlindunga Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology*.” *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 12, No.2, (2021). <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i2.7956>

Hengki Heriyadi, “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11, No. 1, (2023). <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>

Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 3, No. 2, (2019). <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>

I Wayan Bagus Pramana, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 4, (2014).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 20, No. 1, (2017).
<https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>

Irma Muzdalifa, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syarian).” *Jurnal*

Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 1, (2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>

Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Keadilan Progresif.* Vol. 5, No. 1, (2014). <https://api.core.ac.uk/oai/oai:ojs.jurnal.ulb.ac.id:article/442>

Muchamad Handoko dan Made Warka, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-XII/2014.” *Mimbar Keadilan.* Vol. 7, No. 1, (2019). <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162>

Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM.” *Journal AdBispreneur.* Vol. 3, No. 2, (2018). <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>

Nada Ulya Qinvi, “Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online di Google Play Store.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I.* Vol. 9, No. 4, (2022). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26456>

Natal Situmorang, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech).” *Jurnal Hukum Patik.* Vol. 9 No. 3, (2020). <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.240>

Ni Putu M.D.P. Asti, “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.” *Jurnal Acta Comitas.* Vol. 5, No. 1, (2020). <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10>

Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal.* Vol. 2, No. 1, (2018). 24-41. <https://doi.org/10.31869/plj.v2i1.887>

Piere R. Arfi, “Tinjauan Yuridis Layanan Pinjammeminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Technologi (Fintech) Di Indonesia.” *Jurnal Lex Administratum.* Vol. 11, No. 1, (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45370>

Rahmawati, et. al., “Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 5, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>

Ratna Hartanto dan Juliyan Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending.*” *Ius Quia Iustum Law Journal*. Vol. 25, No. 2, (2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 1, 2018 <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Wijayanti.T. “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta).” Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Internet

CNN Indonesia, “Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah.” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknyakasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

Liputan 6, “LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-terorutang-pinjaman-online-adalah-pelanggaran-ham>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019.” <https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-danBerizin-di-OJKper-7-Agustus-2019.aspx>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

Tim Jurnalistik Legalscope, “Perkembangan Fintechdi Indonesia.” <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

Novia Siti, “Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, <http://noviaarsita.blogspot.co.id/2014/07/sejarah-terbentuknya-otoritas-jasa.htm>, diakses 23 September 2023.

NU Online, “Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online”. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengupas-akad-pada-aplikasi-p2p-lending-dan-pinjaman-online-Vdh61>, Di akses 30 September 2023, pukul 07.00 WIB.

Anindi Harahap, “Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 23 September 2023.

FAQ Kategori Umum Otoritas Jasa Keuangan,
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

Financial Stability Board, “*Fintech Credit: Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*”.
<https://www.fsb.org/2017/05/fintech-credit-market-structure-business-models-and-financial-stability-implications/> diakses pada 23 Desember 2023.